

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dilakukan oleh Yasser (2010) dengan Judul “ Peranan penatausahaan Barang Milik Negara terhadap peningkatan keakuratan Data BMN Pada Kanwil XV DJKN Makassar. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan alat analisis “ Fish Bone Analysis Method” yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab beserta akar penyebab masalah baik dari faktor internal maupun eksternal. Analisis dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem penatausahaan BMN di Kanwil XV DJKN Makassar serta mengetahui pengaruh pelaksanaan penatausahaan BMN terhadap keakuratan data laporan BMN khususnya dalam kurun waktu 3 tahun. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan pada Kanwil XV DJKN makassar belum berjalan optimal sehingga mempengaruhi keakuratan data BMN yang tersaji.

Dalam Penelitian Terdahulu di lakukan oleh Ningsih (2012) dengan judul “ Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dan Kualitas laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap kewajaran Informasi Keuangan.

Dalam Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadi S (2013) dengan judul “ Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kayu Agung Palembang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan Penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung Memiliki Pengaruh Positif terhadap Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian penulis, penatausahaan Aset tetap memiliki kontribusi sebesar 50,7% terhadap kualitas laporan keuangannya.

Zulfikar (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Penelitian ini merupakan penelitian *esplanatory*, ialah suatu metode penilitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Dan mendapatkan hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama variabel independen yaitu variabel transparasi dan variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel pengelolaan laporan keuangan daerah. Sedangkan besar pengaruh transparasi dan akuntabilitas dalam memberi kontribusi pengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah sebesar 52,4%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal, dan lain-lain.

Astriani (2013) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penyelesaian Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(survei pada badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat)” penulis melakukan pembahasan, secara keseluruhan pengaruh penyelesaian temuan audit sudah berjalan dengan memadai. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKP provinsi Jawa Barat sudah diterapkan dengan baik. Penyelesaian temuan audit dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh adanya penyelesaian temuan audit yang memadai.

Permadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat) dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi rank spearman sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74.4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , menunjukkan

hasil t_{hitung} sebesar 2,818 dan t_{tabel} sebesar 2,068. Dari hasil pengujian tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,818 > 2,068$ yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Efrianti (2014) dalam skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka” mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten majalengka, ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,363 > t_{tabel}$
2. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Majalengka, ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,560 < t_{tabel}$.
3. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten majalengka ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,516 < t_{tabel}$.

4. pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 59,5% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 40,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.



Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Analisis data	Hasil Penelitian
1	Yasser (2010)	Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Peningkatan Keakuratan Data BMN Pada Kanwil XV DJKN Makassar.	Kualitatif	Fish Bone analysis method	Menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan pada Kanwil XV DJKN makassar belum berjalan optimal sehingga mempengaruhi keakuratan data BMN yang tersaji
2	Ningsih (2012)	Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap kewajaran informasi keuangan	Kuantitatif	Uji statisti t	Menunjukkan bahwa penatausahaan Aset tetap berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kewajaran informasi keuangan
3	Rahmadi S (2013)	Pengaruh penatausahaan Aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor pajak Pratama kayu Agung Palembang	Kuantitatif	Uji Statistik t	Menunjukkan Penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pratama kayu agung memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan peneliti penulis, penatausahaan Aset Tetap memiliki kontribusi sebesar 50,7% terhadap kualitas laporan keuangan

4	Zulfikar (2014)	“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).	Kuantitatif	Uji Statistik F	hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama variabel independen yaitu variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel pengelolaan laporan keuangan daerah. Sedangkan besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam memberi kontribusi pengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah sebesar 52,4%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal, dan lain-lain.
5	Astriani (2013)	Pengaruh Penyelesaian Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (survei pada badan pengawasan keuangan dan Pembangunan	Kualitatif	Analisis kuantitatif kualitatif	Menunjukkan secara keseluruhan pengaruh penyelesaian temuan audit sudah berjalan dengan memadai. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKP provinsi Jawa Barat sudah diterapkan dengan baik.

		(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat)			Penyelesaian temuan audit dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh adanya penyelesaian temuan audit yang memadai.
6	Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)	Kuantitatif	Koefisien Korelasi rank spearman	menyatakan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan nilai korelasi rank spearman sebesar 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. dan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan

					keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74.4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.
7	Efrianti (2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka	Kuantitatif	Korelasi linier berganda	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten majalengka, ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,363 > t_{tabel}$. pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset tetap daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 59,5% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 40,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Barang Milik Negara

2.2.1.1 Pengertian Barang Milik Negara

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi BMN tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

Harta / Barang merupakan karunia dan anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam harta tersebut terdapat milik orang lain yang wajib di distribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun demikian, dalam islam tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menjadi kaya malah harus banyak orang muslim yang menjadi kaya, akan tetapi orang kaya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang dengan kekayaannya ia turut membantu saudara-saudaranya sesama muslim, dan turut

membantu dalam perjuangan dakwah Islam, sehingga kekayaan yang dimilikinya menjadi kekayaan yang barakah, insya Allah.

Konsep harta dalam islam merupakan amanah yang harus didistribusikan secara merata dan menyeluruh kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini terkait dengan amanah dari Allah SWT kepada mereka yang dititipkan harta. Islam sangat menentang perilaku penimbun harta, sebab tindakan tersebut menimbulkan kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Di dalam konsep baitul maal yaitu lembaga yang mengatur barang milik negara, yang didalam hal penggunaannya harus menggunakan untuk kemaslahatan umat berdasarkan kaidah fiqih. Penggunaan Baitul Maal cukup tinggi dari zaman Rasulullah SAW hingga masa pemerintahan berikutnya dan juga hingga saat ini. Eksistensi Baitul Maal sangat membantu para muslim dalam pengelolaan harta yang diterima oleh kaum muslim. Semasa Rasulullah, dana Baitul Maal digunakan dan didistribusikan sepenuhnya untuk kepentingan kaum muslim kala itu. Namun terdapat perbedaan pengelolaan pada masa khalifah Umar bin Khattab. Umar tidak menggunakan seluruh dana Baitul Maal, tetapi sebagian dana tersebut disimpan di Baitul Maal sebagai dana cadangan. Meskipun

demikian, penggunaan dana Baitul Maal pada prinsipnya sama untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim (karim : 2010).

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

sesuatu kebijakan pemerintah (terkait dengan penggunaan barang milik negara, misalnya) harus sesuai dengan kemaslahatan umat.

Jadi dapat dikatakan Baitul maal tersebut sangat membantu untuk kemaslahatan umat dikaitkan dengan kementerian agama yaitu yang tidak lain lembaga yang berlandaskan keislaman setidaknya dapat menjalankan sistem yang mengatur barang milik negara dengan sebaik mungkin sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan.

2.2.1.2 Jenis Barang Milik Negara

Dalam Perlakuan Akuntansi, PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membagi BMN menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lainnya, dan Aset Bersejarah.

2.2.2. Penatausahaan Barang Milik Negara

2.2.2.1. Pengertian Penatausahaan BMN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha (hartanto, 1998:140 dalam yasser, 2010). The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern

memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja (Soebroto, 1988:2 dalam Yasser, 2010). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Halim, 2007:111 dalam Yasser, 2010)

Menurut Per.Menkeu.No.120 (2007:Ps1.1), Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi. Inventarisasi BMN adalah kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan tersebut memerlukan suatu sistem yang konsisten sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi dan mendapatkan hasil yang lebih dari yang dikerjakan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut memberi makna, jika sebuah sistem dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka Allah SWT akan membalasnya dengan memberikan hasil yang lebih baik. Sehingga dalam pelaksanaannya dengan mendorong lembaga atau perusahaan untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Terkait dengan penatausahaan BMN itu sendiri seharusnya dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keadaan.

2.2.2.2. Lingkup Penatausahaan BMN

Seluruh BMN merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan pengelolaan barang. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN

yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan negara pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN

2.2.2.3. Prosedur Penatausahaan BMN

Menurut salinan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 250/PMK.06/2011 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk menyelenggara tugas dan fungsi kementerian/lembaga Bab I ketentuan umum Pasal 1 No 10 Bahwa Prosedur penatausahaan BMN meliputi :

1) Pembukuan

Untuk mendukung keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN maka UPKPB bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan rekonsiliasi secara periodik. Sedangkan untuk tertib administrasi BMN maka UAKPA dan/atau PPK harus menyampaikan dokumen pengadaan termasuk fotocopy SPM dan SP2D kepada UPKPB. Dalam lampiran PMK No. 120/PMK.06/2007.

Pembukuan didefinisikan sebagai kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola

Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Sebelum era reformasi keuangan, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2007:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

2) Inventarisasi

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan

inventarisasi aset negara secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan negara yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a.pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b.usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- c.menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. penggunaan;

5. penatausahaan;
6. pemanfaatan;
7. pengamanan dan pemeliharaan;
8. penilaian;
9. penghapusan;
10. pemindahtanganan;
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. pembiayaan; dan
13. tuntutan ganti rugi.

Pengertian Inventarisasi berdasarkan PMK No.120/PMK.06/2007 adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud dilakukannya inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya.

Perekaman Data Barang untuk dikelompokkan ke dalam Kategori Barang dan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Hasil dari perekaman tersebut secara otomatis membentuk Kode Barang. Perekaman Data Barang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam inventarisasi, seperti di bawah ini:

- Inventarisasi Tanah, meliputi: Harga, Tanggal Perolehan, Lokasi, Luas, Surat Tanah, Unit Pemakai, Pengadaan, Catatan Pengisi, Pengesahan, dan Mutasi.

- Inventarisasi Gedung, meliputi: No. KIB Tanah yang ditempati, Luas, Lokasi, Tahun Guna, Harga, Tanggal Perolehan, Lokasi, Luas, Surat Tanah, Unit Pemakai, Pengadaan, Catatan Pengisi, Pengesahan, dan Mutasi.
- Inventarisasi Kendaraan Bermotor / Alat Angkutan (Motor), meliputi: Detail Mesin (Merk, Tipe, Perakitan, Daya Mesin, dan lainnya), Harga, Tanggal Perolehan, Kelengkapan Motor (helm, jaket, stnk, dll), Unit Pemakai, Pengadaan, Catatan Pengisi, Pengesahan, dan Mutasi.
- Inventarisasi Senjata Api, meliputi: Merk, Tipe, Kaliber, No. Pabrik, Harga, Tanggal Perolehan, Kelengkapan Senjata, Unit Pemakai, Pengadaan, Catatan Pengisi, Pengesahan, dan Mutasi.
- Inventarisasi Ruang, perekaman Inventarisasi Barang yang meliputi: Peralatan Kantor, Komputer, Alat-alat, dll. Barang yang menempati suatu ruang tertentu akan di masukkan dalam Inventarisasi Ruang.
- Inventarisasi Lokasi Lainnya, yaitu perekaman Inventarisasi Barang Lainnya yang tidak menempati suatu ruang tertentu, melainkan lokasi yang bukan milik.
- Pencarian Inventaris, pencarian inventaris suatu barang dapat dilakukan pada seluruh aset yang ada, atau per kategori kelompok, dan atau per unit kerja tempat barang itu berada, dan atau kondisi barang, dan atau status barang.
- Cetak Daftar Inventaris, cetak daftar inventaris dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu: model Cetak Kartu Inventaris tiap barang, dan Cetak Daftar Inventaris, untuk digunakan sebagai Pelaporan atau Arsip.

3) **Pelaporan**

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik Negara yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan. Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca negara.

Hasil sensus barang daerah darimasing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

1. Laporan Mutasi Barang; dan
2. Daftar Mutasi Barang

2.2.3. Laporan Keuangan

2.2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu. (Martono, 2002: 62)

Menurut Harahap (2007:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangandan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 bentuk laporan keuangan yang pokok pada suatu bank yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahab modal, dan laporan aliran kas. Dari keempat laporan tersebut yang digunakan dalam dalam sebuah analisa rasio hanyalah laporan neraca dan laporan laba rugi. sehingga laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Harahap juga mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk laporan yang bersifat adil dimana didalamnya di laporkan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penciptaan pertambahan nilai bukan hanya kontribusi pemilik modal, karyawan, pemilik, kreditur, pemerintah di tunjukkan dalam laporan. Hal ini sejalan dengan konsep islam terutama dalam hal keadilan. Di jelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah diatas mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan ekonomi harus dicatat. Dan dalam proses

pencatatan tersebut harus ada dua orang saksi. Agar pencatatan dilakukan dengan benar sesuai dengan keadaan tanpa ada yang disembunyikan. Islam mengajarkan kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi, khususnya yang menyangkut kepentingan publik sangat penting adanya standar pencatatan menurut pandangan islam. Segala yang menyangkut niaga, hutang, dan barang milik negara juga harus dicatat dan harus terbuka agar bisa dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Pada dasarnya pencatatan diperuntukkan demi kemaslahatan bersama sebagai landasan ekonomi syariah, maka dianggap penting tugas tersebut dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan seperti yang telah diajarkan dalam Al-qur'an dan Al-Hadits.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002: 160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial

Dalam PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penggunaan laporan keuangan pemerintah menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, kekuatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok tersebar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan Kredit

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk

penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

2.2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2002: 4) dijelaskan bahwa “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi”. Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto(aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mngungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Dengan demikian laporan keuangan selain memberikan informasi dan menggambarkan kondisi keuangan sebuah usaha, juga untuk menilai kinerja manajemen apakah berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan bidang keuangan khususnya. Hal ini akan tergambar pada laporan keuangan yang disusun pihak manajemen.

2.2.3.3. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah informasi apabila diubah ke dalam konteks yang memberikan makna.

Wikinson (2000) mendefinisikan limabelas dimensi kualitas laporan keuangan yang dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu:

1. Kualitas instrinsik : akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi,
2. Kualitas aksesibilitas : akses, dan keamanan,
3. Kualitas kontekstual : relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan
4. Kualitas representasi : interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas dan perwalian konsisten.

Untuk memenuhi keragaman kebutuhan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disusun harus memenuhi kebutuhan semua pihak secara inependen. Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK 2015 : 7) menetapkan 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, informasi kompleks yang

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

Peran informasi dalam peralaman (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi struktur dan besarnya aset yang di miliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entinitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, sebagai contoh, tentang bagaimana struktur keuangan entinitas diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspetasi di masa lalu

- Memilik manfaat prediktif (*Prediktif Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dan berguna dalam pengambila keputusan

- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utam yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesehatan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Sebagai contoh, jika keabsaham dan jumlah tuntutan atas kerugian

dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entinitas untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, walaupun demikian mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi sebagai contoh, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas dan ekuitas entinitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan untuk menyesuaikan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusul seperti peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entinitas pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun dalam kegiatan usahanya entinitas dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos

tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

- Subtansi Menungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomik dan bukan hanya bentuk hukumnya. Subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

- Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

- Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau

penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, sebagai contoh, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan liabilitas atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

- Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat diperbandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

2.2.3.4. Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan bersifat histories serta menyeluruh dan sebagian dari suatu laporan kemajuan.

2.2.3.5. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklarifikasi dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah :

1. Aktiva adalah sumber dayayang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh.
2. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang dapat timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residualatas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002 : 9)
4. Rugi laba adalah suatu alat ukur hasil operasi perusahaan dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkannya, sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi yaiu : penghasilan dan beban.(Standar Akuntansi Keuangan, 2002: 12)

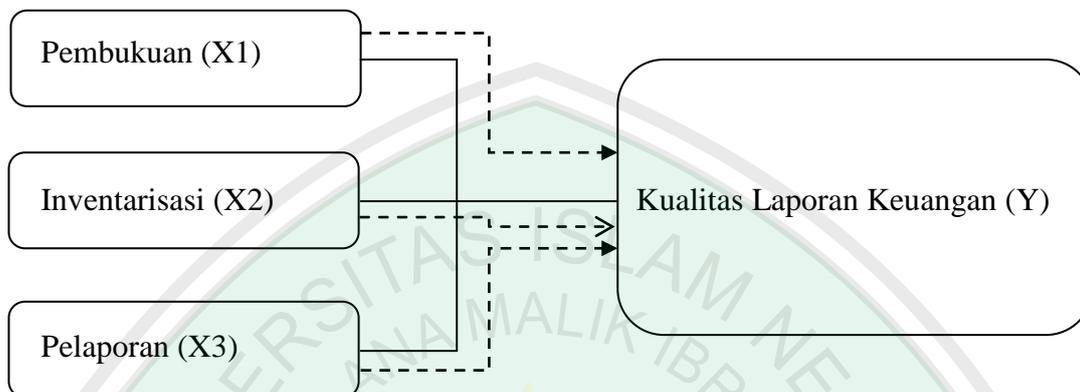
5. Kinerja, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi.

2.3. Kerangka Konseptual

Pengelolaan barang milik Negara/Daerah merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementreian/lembaga negara.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemendagri no. 13 tahun 2006. Dengan meningkatkan sistem Inventarisasi dan Pelaporan yang baik, maka akan berdampak baik untuk keberhasilan Pengamanan Aset daerah. Dan dengan meningkatnya sistem Inventarisasi dan Pelaporan terhadap BMD tersebut, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih reliablemengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif di lingkungan aktivitas Kementerian Agama Kota Probolinggo.

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- > : Simultan
 - - - - -> : Parsial

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara atas pertanyaan yang disebutkan peneliti dalam rumusan masalah. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis inilah maka peneliti akan melakukan pengujian menggunakan data/fakta yang diperoleh dari tempat penelitian. Hipotesis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan

Variabel bebas yang terdiri dari variabel Pembukuan (X_1), Inventarisasi (X_2), Pelaporan (X_3), secara simultan mempengaruhi loyalitas konsumen. Mengacu pada penelitian Rahmadi S (2013) analisis menunjukkan bahwa

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1.1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Pengaruh Pembukuan terhadap Kualitas Laporan keuangan

Pembukuan didefinisikan sebagai kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembukuan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karena apabila pembukuan tersebut tidak tercatat secara rapi akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan.

Mengacu pada penelitian Rahmadi S (2013) analisis menunjukkan bahwa pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1.2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Pengaruh Inventarisasi Terhadap kualitas laporan Keuangan

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang

dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Dan dapat disimpulkan bahwa inventarisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Mengacu pada penelitian rahmadi S (2013) dan Willy Yanti (2012) analisis menunjukkan inventarisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh yasser (2010) analisis menunjukkan inventarisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1.3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Inventarisasi terhadap Kualitas Laporan keuangan.

4) Pengaruh Pelaporan Terhadap Kualitas laporan Keuangan

pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Perusahaan juga sudah menyediakan aplikasi SIMAK-BMN agar pelaporan dapat dikerjakan dengan mudah. Apabila pelaporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka akan mengakibatkan laporan keuangan yang tidak benar. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaporan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Mengacu pada penelitian Rahmadi S (2013) dan Willy Yanti (2012) analisis menunjukkan bahwa pelaporan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1.4: Terdapat pengaruh positif antara Pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis / sistem pembukuan. Menurut Martono (2001:16), sistem pembukuan adalah “ Himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Berdasarkan teori diatas maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pembukuan merupakan variable yang dominan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.